

Dinamika Kekuasaan Islam di Nusantara Abad ke-17: Studi Komparatif Sultan Iskandar Muda di Aceh dan Sultan Agung di Mataram

Silviana Zahro

UIN Sunan Ampel Surabaya

silvianazahro05@gmail.com

Ahmad Nur Fuad

UIN Sunan Ampel Surabaya

nurfuad@uinsa.ac.id

Abstrak: Penelitian ini membahas dinamika kekuasaan Islam di Nusantara pada abad ke-17 melalui studi komparatif terhadap dua penguasa besar, Sultan Iskandar Muda di Kesultanan Aceh dan Sultan Agung di Kesultanan Mataram. Masalah utama penelitian ini adalah bagaimana perbedaan konteks sosial-politik memengaruhi pola kepemimpinan keduanya dalam menghadapi tantangan internal dan eksternal. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis persamaan dan perbedaan strategi politik, militer, dan keagamaan yang diterapkan oleh kedua sultan dalam mempertahankan legitimasi dan stabilitas kekuasaan. Metode yang digunakan adalah metode sejarah dengan pendekatan komparatif melalui tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sultan Iskandar Muda memperkuat kekuasaannya melalui orientasi maritim, perdagangan, dan diplomasi internasional, sedangkan Sultan Agung meneguhkan kekuasaan agraris berbasis birokrasi dan integrasi budaya Islam-Jawa. Keduanya menggunakan Islam sebagai dasar legitimasi politik dan simbol kesatuan kerajaan, serta berhasil membawa Aceh dan Mataram mencapai puncak kejayaan Islam di Nusantara sebelum mengalami kemunduran akibat faktor internal dan eksternal.

Kata Kunci: *Aceh, Mataram, Komparatif.*

PENDAHULUAN

Abad ke-17 merupakan periode penting dalam sejarah Nusantara, khususnya dalam konteks perkembangan kekuasaan Islam. Pada masa ini, muncul dua penguasa besar yang membawa kerajaan Islam mencapai puncak kejayaannya, yaitu Sultan Iskandar Muda di Aceh (1607–1636) dan Sultan Agung di Mataram (1613–1645). Keduanya hidup pada zaman yang sama, tetapi menghadapi tantangan politik, militer, dan keagamaan yang berbeda sesuai dengan konteks geografis dan sosial masing-masing. Sultan Iskandar Muda menanggapi ancaman Portugis dengan kekuatan maritim (Mailin, 2021). Sedangkan Sultan Agung menghadapi VOC dan konflik internal dengan ekspansi politik serta integrasi budaya Islam-Jawa. Keduanya juga sama-sama berhasil membawa kerajaannya mencapai puncak kejayaan, namun dengan corak yang berbeda. Aceh

berkembang sebagai kekuatan maritim dengan menguasai jalur perdagangan Selat Malaka sekaligus menjadi pusat penyebaran Islam di kawasan barat Nusantara, sementara Mataram mengonsolidasikan kekuasaan berbasis agraris di pedalaman Jawa dengan menekankan integrasi politik, militer, dan budaya (Ricklefs, 2008).

Kajian mengenai kepemimpinan Sultan Iskandar Muda di Aceh dan Sultan Agung di Mataram penting untuk dilakukan karena keduanya merepresentasikan dua model kekuasaan Islam yang berkembang secara berbeda dalam konteks Nusantara abad ke-17. Selain itu kajian tentang perbandingan dua figur ini juga dapat menambah wawasan historiografi Islam Nusantara, yang selama ini lebih banyak menyoroti kerajaan secara terpisah, bukan dalam perspektif komparatif. Perbandingan keduanya tidak hanya penting untuk memahami variasi pola kepemimpinan Islam di Nusantara, tetapi juga relevan dalam melihat bagaimana kekuasaan lokal merespons penetrasi kolonialisme Portugis dan Belanda. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya kajian sejarah peradaban Islam di Nusantara melalui pendekatan komparatif yang menekankan pada dimensi politik, militer, dan agama.

Tujuan utama artikel ini adalah untuk menganalisis secara komparatif aspek politik, militer, dan keagamaan dari kepemimpinan Sultan Iskandar Muda dan Sultan Agung. Artikel ini berargumen bahwa meskipun keduanya sama-sama menggunakan Islam sebagai legitimasi kekuasaan dan berupaya menghadapi dominasi kolonial, strategi yang ditempuh berbeda: Iskandar Muda berorientasi maritim dengan basis perdagangan dan diplomasi internasional, sementara Sultan Agung lebih menekankan kekuasaan agraris dengan konsolidasi internal dan integrasi budaya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah dengan pendekatan komparatif. Penelitian ini mengikuti langkah-langkah metode sejarah, yang meliputi tahap heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Metode sejarah komparatif adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk membandingkan dua atau lebih fenomena sejarah atau entitas untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, atau pola yang mungkin ada di antara mereka. Beberapa Sumber yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku *Kerajaan Aceh Jaman Sultan Iskandar Muda (1607- 1636)* karya Denys Lombard, *Awal Kebangkitan Mataram* dan *Kerajaan – Kerajaan Islam di Jawa* Karya DR. H. J De Graaf. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori legitimasi kekuasaan Max Weber, yang membedakan antara otoritas tradisional, karismatik, dan legal-rasional. Dengan kerangka ini, penelitian akan membandingkan cara kedua sultan membangun dan mempertahankan otoritasnya dalam konteks sosial-politik yang berbeda.

Artikel ini dibagi ke dalam beberapa bagian. Bagian pertama adalah pendahuluan. Bagian kedua membahas konteks Sejarah Kesultanan Aceh dan Mataram pada abad ke-17. Bagian ketiga menganalisis kepemimpinan Sultan Iskandar Muda dan Sultan Agung, meliputi aspek politik, militer, dan agama. Bagian keempat membandingkan persamaan dan perbedaan strategi keduanya dalam menghadapi tantangan internal maupun eksternal. Terakhir, bagian penutup menyajikan kesimpulan mengenai dinamika kekuasaan Islam di Nusantara pada abad ke-17 berdasarkan studi komparatif ini.

Sejarah Kesultanan Aceh

Kerajaan Aceh merupakan salah satu kerajaan Islam terbesar di Nusantara yang memainkan peranan penting dalam sejarah Asia Tenggara pada abad ke-16 hingga ke-17. Kerajaan ini berpusat di Kutaraja yang saat ini dikenal dengan sebutan Banda Aceh, di ujung utara Pulau Sumatra. Letak geografis Aceh yang menghadap langsung ke Selat Malaka membuatnya memiliki posisi yang sangat strategis. Selat Malaka sejak lama menjadi jalur perdagangan internasional yang vital, menghubungkan pusat-pusat ekonomi dunia dari Tiongkok, India, Timur Tengah, hingga Eropa. Dengan demikian, Aceh berkembang bukan hanya sebagai pusat perdagangan, tetapi juga sebagai gerbang dakwah Islam serta arena pertemuan berbagai budaya dan tradisi.

Awal mula berdirinya Kesultanan Aceh tidak bisa dipisahkan dari proses islamisasi yang sudah berlangsung sejak abad ke-13, ketika para pedagang Muslim dari Gujarat, Arab, dan Persia mulai berdatangan ke wilayah pesisir Sumatra. Setelah kemunduran Samudra Pasai pada akhir abad ke-15, Aceh muncul sebagai kekuatan baru yang mengambil alih peran politik dan ekonomi di daerah tersebut. Sultan pertama yang tercatat dalam sejarah Aceh adalah Sultan Ali Mughayat Syah (berkuasa sekitar 1514–1530), yang berhasil menyatukan wilayah-wilayah di sekitarnya, mengusir kekuatan Portugis dari beberapa benteng di pantai utara Sumatra, serta memperkuat identitas Islam dalam kerajaannya (Lombard, 1991).

Perkembangan Aceh semakin pesat setelah jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511. Peristiwa itu memberi peluang besar bagi Aceh untuk menggantikan posisi Malaka sebagai pusat perdagangan dan Islamisasi di kawasan. Dengan menguasai jalur penting di Selat Malaka, Aceh mampu menarik pedagang dari berbagai bangsa, termasuk Arab, India, Persia, Tiongkok, dan bahkan Eropa (Ricklefs, 2008). Pada periode inilah Aceh mulai menjalin hubungan diplomatik dengan dunia Islam internasional, terutama dengan Kesultanan Utsmani di Turki, Gujarat, dan negara-negara Islam lain. Hubungan ini penting, sebab tidak hanya memberikan dukungan militer dalam bentuk teknologi persenjataan, tetapi juga memperkuat legitimasi Aceh sebagai kerajaan Islam yang berwibawa.

Puncak kejayaan Aceh terjadi pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607–1636). Di bawah kepemimpinannya, Aceh mengalami ekspansi wilayah yang signifikan hingga menguasai sebagian besar pesisir Sumatra dan Semenanjung Malaka. Iskandar Muda berhasil mengonsolidasikan kekuasaan dengan memperkuat birokrasi kerajaan dan mengurangi peran uleëbalang (bangsawan lokal) yang sering menjadi ancaman terhadap otoritas pusat. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, dia telah menjadikan Aceh sebagai penguasa yang terkemuka di Asia Tenggara.

Namun, setelah wafatnya Iskandar Muda, Aceh mulai mengalami kemunduran. Sultan-sultan berikutnya tidak memiliki kharisma dan kekuatan politik yang sama kuat, sehingga peran uleëbalang kembali mendominasi. Fragmentasi politik internal, ditambah dengan meningkatnya kekuatan Belanda (VOC) di jalur perdagangan Asia Tenggara, membuat posisi Aceh semakin terdesak. Pada pertengahan abad ke-17, meskipun masih

berpengaruh, Aceh tidak lagi mampu mempertahankan supremasinya seperti masa kejayaan Iskandar Muda (Said, 1981).

Kesultanan Mataram

Kesultanan Mataram Islam adalah salah satu kerajaan terbesar di Jawa yang didirikan pada akhir abad ke-16 dan mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-17. Kerajaan ini muncul setelah melemahnya Kesultanan Pajang, ketika Ki Ageng Pamanahan, yang menjabat sebagai bupati Mentaok, diberikan wilayah luas di pedalaman Jawa oleh Sultan Hadiwijaya dari Pajang. Putranya, Sutawijaya, yang kemudian dikenal dengan gelar Panembahan Senapati, berhasil mendirikan kerajaan baru yang berpusat di Mataram sekitar tahun 1587 (Graaf, 1987). Sejak awal berdirinya, Mataram memiliki tujuan untuk menyatukan pulau Jawa di bawah satu kekuasaan politik Islam (Ricklefs, 2008).

Pada masa pemerintahan Senapati, Mataram mulai memperluas wilayah kekuasaannya melalui berbagai ekspedisi militer ke daerah-daerah sekitarnya. Namun, perluasan wilayah yang lebih besar terjadi saat Sultan Agung Anyakrakusuma memimpin (1613–1645). Di bawah kepemimpinannya, hampir seluruh Jawa berhasil ditaklukkan, kecuali wilayah Banten di bagian barat dan Batavia yang sudah berada di bawah kendali VOC. Langkah ini menggambarkan bagaimana Sultan Agung memperkuat dominasi Mataram di Jawa sekaligus menunjukkan ambisinya untuk mengusir pengaruh kolonial Eropa.

Kenaikan Sultan Agung (1613–1645) menandai puncak politik dan budaya Mataram. Di bawah kepemimpinannya Mataram mencapai wilayah terbesar: sebagian besar Jawa tengah dan timur berada di bawah pengaruh atau kontrolnya. Sultan Agung dikenal sebagai raja yang melakukan reformasi administratif, memperkuat birokrasi, dan mempromosikan integrasi simbolis agama (Islam) ke dalam aturan-aturan istana, sebuah proses yang oleh sebagian sejarawan disebut sebagai *Islamisasi* konteks istana Jawa, yakni penggabungan unsur Islam ke legitimasi kerajaan tanpa menghapus sepenuhnya adat dan kosmologi Jawa yang lebih tua (Afida et al., 2024).

Sejak awal abad ke-17 kontak antara Mataram dan Belanda (VOC) berubah cepat dari hubungan dagang menjadi konflik politik-militer. VOC, yang mengendalikan pelabuhan dan jalur perdagangan pesisir (terutama Batavia), memiliki teknologi senjata, kapal, dan jaringan perdagangan internasional yang memberi keunggulan sustained. Upaya Mataram menggulingkan kekuasaan pesisir (seperti pengepungan Batavia) menunjukkan ambisi politik dan ekonomi Mataram, tetapi kekalahan dalam beberapa pertempuran dan masalah logistik membuat hubungan menjadi biaya tinggi. Dalam dekade-dekade berikutnya, konflik berulang, perjanjian yang tidak menguntungkan, dan tekanan ekonomi mulai mengikis otonomi Mataram, membuka jalan bagi campur tangan VOC dalam urusan suksesi dan politik istana (Inajati, 2005).

Setelah masa Sultan Agung, Mataram memasuki periode yang lebih rapuh: suksesi bergolak, konflik internal antar-keluarga istana, serta beban ekonomi dari perang dan upaya mempertahankan kontrol wilayah. Periode Amangkurat I dan Amangkurat II

ditandai dengan konflik internal dan pemberontakan besar, termasuk Pemberontakan Trunajaya (1670-an) yang mengguncang inti kekuasaan Mataram. Penggulingan dan tahanan, serta pembuangan tokoh-tokoh penting, melemahkan kohesi politik. VOC memanfaatkan situasi ini: dengan intervensi militer dan perjanjian politik, VOC semakin mengukuhkan posisinya sebagai arbiter suksesi dan pemegang pengaruh besar dalam politik Jawa (Yuwono & Braake, 2025).

Abad ke-18 menandai tahap akhir dari proses pecahnya Kesultanan Mataram menjadi beberapa entitas politik yang lebih kecil. Setelah terjadinya perang suksesi, termasuk Perang Suksesi Jawa III, serta perselisihan antar pangeran seperti Pangeran Mangkubumi (R. Mangkubumi) dan Raden Mas Said, VOC mengambil peran dalam memediasi perjanjian pembagian wilayah Mataram. Perjanjian Giyanti yang ditandatangani pada 13 Februari 1755 secara resmi membagi Mataram menjadi dua kerajaan, yaitu Kasunanan Surakarta yang dipimpin oleh Pakubuwono III dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi dengan gelar Hamengkubuwono I. Selanjutnya, muncul pula kerajaan-kerajaan kecil lain seperti Mangkunegaran sebagai hasil dari pembagian wilayah dan konsesi politik yang difasilitasi oleh VOC. Pembagian ini menandai berakhirnya dominasi Mataram sebagai kerajaan tunggal yang berkuasa luas di Jawa Tengah dan Timur; meskipun istana-istana baru tersebut tetap memiliki peran penting dalam bidang budaya dan politik, kekuasaan politik teritorial menjadi terpecah-pecah dan semakin dipengaruhi oleh kekuatan Belanda.

Kesultanan Aceh Masa Sultan Iskandar Muda

Kesultanan Aceh mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Pemerintahan Iskandar Muda sering dipandang sebagai periode emas dalam sejarah Aceh, karena pada masa inilah kekuasaan politik, militer, ekonomi, dan keagamaan kerajaan berada pada tingkat tertinggi. Sultan Iskandar Muda, yang memerintah pada tahun 1607–1636, dikenal sebagai penguasa yang ambisius dan visioner. Sejak awal pemerintahannya, ia berupaya memperkuat struktur kekuasaan Aceh, baik dari sisi internal maupun eksternal. Dari dalam, Sultan melakukan konsolidasi politik dengan menundukkan kerajaan-kerajaan kecil di Sumatra bagian utara seperti Deli, Aru, Pasai, serta beberapa daerah di Semenanjung Melayu. Penaklukan ini bertujuan bukan hanya untuk memperluas kekuasaan teritorial, melainkan juga mengamankan jalur pasokan komoditas lada agar dapat dikendalikan langsung oleh pusat pemerintahan di Aceh. Dengan demikian, kerajaan memperoleh keuntungan ekonomi yang besar dan dapat memperkuat stabilitas politiknya (Lombard, 1991).

Keberhasilan ekspansi tersebut tidak dapat dilepaskan dari kemampuan militer Aceh. Iskandar Muda membangun armada laut yang besar, lengkap dengan kapal perang dan persenjataan modern yang didapatkan melalui jaringan hubungan dengan Turki Utsmani serta pedagang dari Timur Tengah dan India. Armada ini memungkinkan Aceh menantang dominasi Portugis di Selat Malaka. Walaupun beberapa kali serangan Aceh ke Malaka tidak menghasilkan kemenangan penuh, upaya ini membuktikan bahwa Aceh

adalah kekuatan maritim besar di kawasannya. Armada yang kuat juga berfungsi sebagai alat pertahanan yang efektif dalam menjaga kedaulatan wilayahnya.

Selain aspek militer, Iskandar Muda juga melakukan reformasi dalam bidang pemerintahan. Ia memperkenalkan sistem pengawasan yang lebih terpusat terhadap daerah-daerah taklukan. Para penguasa lokal atau *uleebalang* tetap diberi kewenangan mengatur wilayahnya, tetapi mereka tetap berada di bawah kendali Sultan langsung. Dengan cara ini, Sultan bisa menjaga keseimbangan antara memberikan ruang bagi elite lokal sekaligus memastikan kesetiaan mereka kepada pusat. Sistem semacam ini mampu menekan potensi pemberontakan dan memperkuat otoritas kerajaan (Ricklefs, 2008).

Di bidang sosial-keagamaan, masa pemerintahan Iskandar Muda ditandai dengan semakin kuatnya peran Islam dalam kehidupan masyarakat. Kehadiran ulama-ulama besar, seperti Syamsuddin as-Sumatrani, memperkaya khazanah pemikiran keagamaan di Aceh. Ajaran-ajaran tasawuf berkembang pesat dan memberi warna pada tradisi keislaman setempat. Dukungan Sultan terhadap para ulama menjadikannya dipandang sebagai pelindung agama sekaligus pemimpin duniawi. Hal ini menambah legitimasi politiknya di mata rakyat, sebab penguasa yang melindungi agama dipandang memiliki otoritas spiritual yang sah.

Iskandar Muda juga menjalin hubungan diplomatik dengan berbagai kerajaan Islam lain, termasuk Turki Utsmani, Gujarat, dan negeri-negeri Arab. Hubungan ini memperluas jaringan Aceh dalam perdagangan, memperkuat hubungan keagamaan, dan memberikan keuntungan strategis, khususnya dalam memperoleh teknologi persenjataan serta dukungan politik. Dengan adanya jaringan internasional, Aceh tampil bukan hanya sebagai kerajaan regional, tetapi juga sebagai bagian dari komunitas Islam global.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa kebijakan ekspansi dan monopoli perdagangan Aceh juga menimbulkan tantangan tersendiri. Beberapa wilayah taklukan merasa keberatan dengan kebijakan pusat yang ketat, sehingga sesekali muncul perlawanan. Selain itu, konflik internal di kalangan bangsawan istana juga menjadi masalah yang harus dihadapi. Meski begitu, kepemimpinannya yang tegas membuat Aceh tetap stabil dan kuat hingga akhir pemerintahannya.

Secara keseluruhan, periode Sultan Iskandar Muda sering disebut sebagai puncak kejayaan Kesultanan Aceh. Pada masa inilah Aceh tampil sebagai kerajaan besar yang mampu menggabungkan kekuatan ekonomi, militer, politik, dan agama dalam satu tatanan yang relatif harmonis. Meskipun setelah wafatnya Sultan kejayaan ini perlahan mengalami penurunan, warisan politik dan sosial yang dibangun Iskandar Muda tetap menjadi bagian penting dalam sejarah peradaban Islam di Nusantara.

Kesultanan Mataram Masa Sultan Agung Anyakrakusuma

Kesultanan Mataram mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Agung Anyakrakusuma (1613–1645). Ia dikenal sebagai raja terbesar dalam sejarah Mataram karena berhasil memperluas wilayah, mengonsolidasikan kekuasaan politik, serta menyatukan tradisi Jawa dengan Islam sebagai fondasi legitimasi. Sebelum naik takhta, Mataram telah berkembang di bawah kepemimpinan Senapati dan

Panembahan Hanyakrawati, namun masih menghadapi tantangan dari kerajaan-kerajaan kecil di Jawa, Banten di ujung barat, serta ancaman Portugis dan kemudian Belanda di pesisir utara. Ketika Sultan Agung naik ke tampuk kekuasaan, ia mewarisi kerajaan yang kuat di pedalaman Jawa, tetapi belum sepenuhnya mampu mengendalikan seluruh wilayah strategis di pesisir utara Jawa yang dikuasai kekuatan dagang lokal maupun pihak asing (Ricklefs, 2008).

Sultan Agung menaruh perhatian besar pada aspek militer dan politik ekspansi. Langkah pertamanya adalah menundukkan kerajaan-kerajaan kecil di Jawa Timur dan Tengah. Kediri, Pasuruan, Tuban, Surabaya, dan Madura menjadi target utama karena wilayah tersebut memiliki pelabuhan penting yang menghubungkan perdagangan laut Jawa dengan Maluku. Perlawanan paling kuat datang dari Surabaya yang memiliki jaringan dagang luas dan aliansi dengan daerah-daerah sekitar. Setelah perang panjang dan pengepungan yang melelahkan, Surabaya akhirnya ditaklukkan pada tahun 1625. Dengan jatuhnya Surabaya, Mataram menguasai hampir seluruh Jawa Tengah dan Timur, serta memiliki pengaruh besar di pesisir utara. Hal ini menjadikan Mataram sebagai kekuatan terbesar di Jawa, melampaui kerajaan-kerajaan sezamannya (Afida et al., 2024).

Selain menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil, Sultan Agung juga melakukan perlawanan terhadap kekuatan asing, terutama Belanda (VOC) yang sejak awal abad ke-17 berupaya menguasai perdagangan di Nusantara. Ketegangan antara Mataram dan VOC meningkat setelah Belanda berhasil menguasai Jayakarta dan mendirikan Batavia pada tahun 1619. Bagi Sultan Agung, keberadaan VOC di Batavia tidak hanya mengancam jalur perdagangan, tetapi juga kedaulatan politik di Jawa. Pada tahun 1628 dan 1629, ia meluncurkan dua ekspedisi besar untuk menyerang Batavia. Ekspedisi pertama gagal akibat kendala logistik dan pertahanan VOC yang kuat. Ekspedisi kedua pada 1629 melibatkan pasukan besar, namun kembali gagal karena suplai makanan dan senjata terputus oleh VOC serta munculnya wabah penyakit di kalangan prajurit Mataram. Walaupun gagal menaklukkan Batavia, serangan ini membuktikan bahwa Mataram di bawah Sultan Agung merupakan satu-satunya kekuatan pribumi yang mampu menantang secara langsung dominasi VOC di Jawa pada abad ke-17.

Dalam bidang kebudayaan dan spiritual, Sultan Agung berhasil menyatukan tradisi Jawa dengan Islam. Ia dikenal sebagai raja yang religius sekaligus pelindung budaya Jawa. Salah satu warisannya adalah reformasi kalender Jawa pada tahun 1633, ketika ia menggabungkan sistem kalender Saka yang bercorak Hindu-Jawa dengan kalender Hijriah yang bercorak Islam (Yumna Nur, 2023). Kalender Sultan Agung ini menjadi simbol akulturasi budaya yang memperlihatkan bagaimana Islam diintegrasikan ke dalam kosmologi Jawa tanpa menghapus warisan Hindu-Buddha. Reformasi kalender ini berfungsi tidak hanya sebagai penanda waktu, tetapi juga sebagai instrumen legitimasi politik, karena menunjukkan bahwa Sultan Agung adalah penguasa yang mampu menjembatani dua tradisi besar Nusantara.

Sultan Agung juga membangun konsep kekuasaan yang memadukan politik, spiritualitas, dan budaya. Ia memproyeksikan dirinya sebagai raja yang memiliki kedudukan kosmis, penghubung antara dunia manusia dengan dunia spiritual. Hal ini

tercermin dalam pembangunan kompleks makam raja di Imogiri, yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat pemakaman keluarga kerajaan, tetapi juga sebagai simbol sakralisasi kekuasaan Mataram. Selain itu, kesusastraan Jawa pada masa Sultan Agung berkembang pesat. Karya besar seperti *Serat Sastra Gending* dan karya-karya sufistik yang berkembang di istana memperlihatkan upaya untuk membangun tradisi intelektual yang berakar pada Islam tetapi tetap bercorak Jawa (Aziz & Abdurrahman, 2022).

Meskipun kekuasaan Sultan Agung sangat besar, tidak semua daerah di Nusantara berhasil ia kuasai. Banten di Jawa Barat tetap menjadi kekuatan tersendiri dengan jaringan dagang internasionalnya, sementara Bali dan Makassar di luar Jawa juga tidak jatuh ke tangan Mataram. Setelah kematiannya pada tahun 1645, Mataram menghadapi tantangan besar, terutama dari Belanda yang semakin memperluas pengaruh politik dan ekonomi di Jawa. Namun demikian, warisan Sultan Agung tetap abadi sebagai puncak kejayaan Kesultanan Mataram. Ia dikenang bukan hanya sebagai raja penakluk, tetapi juga sebagai pemimpin budaya dan spiritual yang berhasil mengintegrasikan warisan Jawa dengan Islam, serta penguasa pribumi yang berani menantang kekuatan kolonial Eropa (Munawar, 2021).

Dengan demikian, masa pemerintahan Sultan Agung Anyakrakusuma dapat dipandang sebagai titik kulminasi dalam sejarah Mataram. Ia berhasil menaklukkan kekuatan-kekuatan lokal, menantang dominasi asing, serta menciptakan warisan budaya yang bertahan hingga berabad-abad kemudian. Meskipun ekspedisinya ke Batavia gagal, simbol perlawanan itu menunjukkan bahwa Mataram pernah menjadi kerajaan pribumi terbesar yang berdiri tegak menghadapi gelombang kolonialisme di Asia Tenggara.

Perbandingan Strategi Kepemimpinan Keduanya dalam Menghadapi Tantangan Internal dan Eksternal

Sultan Iskandar Muda dari Aceh dan Sultan Agung dari Mataram merupakan dua tokoh besar yang hidup pada masa yang hampir bersamaan, yakni paruh pertama abad ke-17. Keduanya menempati posisi penting dalam sejarah politik islam nusantara karena berhasil membawa masing-masing kerajaannya mencapai puncak kejayaan baik dalam bidang politik, militer, agama ataupun kebudayaan. Akan tetapi, di balik kesuksesan tersebut, baik Aceh maupun Mataram menghadapi tantangan berat, baik dari dalam kerajaan berupa konflik kekuasaan dan ketegangan sosial, maupun dari luar yang datang dari kekuatan kolonial Eropa dan rival regional. Namun, melalui visi politik yang kuat, strategi militer yang cermat, serta pemanfaatan legitimasi keagamaan, keduanya mampu membawa kerajaan masing-masing mencapai masa kejayaan sebelum akhirnya menghadapi fase kemunduran.

Secara umum, kedua pemimpin ini memiliki kesamaan dalam upaya memperkuat kekuasaan pusat dengan cara sentralisasi kekuasaan. Sultan Iskandar Muda merombak dan menata ulang struktur politik Aceh dengan membatasi kewenangan uleebalang atau bangsawan daerah yang sebelumnya memiliki kemandirian besar. Langkah ini berhasil memusatkan kekuasaan di istana serta mengendalikan wilayah strategis di sepanjang pesisir Sumatra. Strategi sejenis juga diterapkan oleh Sultan Agung di Mataram, yang

memperkokoh posisi raja sebagai sumber utama kekuasaan politik dengan mengawasi langsung pejabat-pejabat lokal seperti bupati dan adipati agar tidak muncul kekuatan pesaing (Graaf & Pigeaud, 1985). Kedua strategi tersebut menunjukkan visi yang sama dalam membangun pemerintahan yang terpusat, stabil, dan menegaskan kedudukan sultan sebagai pemimpin tertinggi.

Dari segi ekonomi, kedua pemimpin ini memahami pentingnya pengelolaan sumber daya untuk memperkuat kekuatan politik dan militer. Sultan Iskandar Muda membangun sistem monopoli perdagangan lada dan menjadikan Aceh sebagai pusat transit penting bagi para pedagang dari Timur Tengah, India, dan Eropa. Melalui sistem ini, ia dapat mengendalikan harga serta distribusi komoditas strategis, yang kemudian memperkuat kas kerajaan dan mendanai kegiatan militer (Lombard, 1991). Sementara itu, Sultan Agung lebih fokus pada ekonomi agraris dengan memanfaatkan hasil pertanian dari daerah pedalaman Jawa untuk mendukung biaya perang dan pemerintahan (Graaf & Pigeaud, 1985). Meskipun berbeda dalam bentuk, Aceh dengan ekonomi maritim dan Mataram dengan ekonomi pertanian, keduanya sama-sama menggunakan serta memanfaatkan potensi ekonomi sebagai fondasi kekuatan negara.

Dalam menghadapi tantangan eksternal, Iskandar Muda dan Sultan Agung sama-sama menunjukkan keberanian melawan kekuatan asing, meskipun dalam konteks yang berbeda. Sultan Iskandar Muda secara langsung berhadapan dengan Portugis di Selat Malaka dengan menggelar berbagai ekspedisi militer untuk merebut kembali Malaka, serta memperkuat aliansi dengan Kesultanan Turki Utsmani dan Gujarat (Lombard, 1991). Upaya ini tidak hanya bersifat militer, tetapi juga diplomatik, karena Aceh ingin menjadi pusat Islam di Asia Tenggara dengan hubungan luas ke dunia Muslim internasional (Azyumardi Azra, 2004). Di sisi lain, Sultan Agung berhadapan dengan kolonial VOC Belanda yang telah membangun benteng kuat di Batavia. Ia melakukan dua serangan besar ke Batavia pada tahun 1628 dan 1629, yang menunjukkan tekad kuat untuk mengusir pengaruh Eropa dari Jawa, meskipun upaya tersebut gagal karena keterbatasan persenjataan dan logistik (Susilo, 2020). Kedua penguasa ini melihat kolonialisme sebagai ancaman terhadap kedaulatan dan identitas Islam di Nusantara, sehingga memilih strategi konfrontasi sebagai bentuk perlawanan terhadap kekuatan asing.

Dalam menghadapi tantangan internal, keduanya juga memperlihatkan strategi yang mirip namun dijalankan dengan cara yang khas. Sultan Iskandar Muda lebih mengatkan pengawasan terhadap bangsawan lokal dan juga memperkuat birokrasi pusat. Ia juga menggunakan legitimasi agama dengan menggandeng para ulama dan cendekiawan Islam, seperti Hamzah Fansuri dan Nuruddin ar-Raniri, untuk membangun ideologi politik Islam yang mendukung kekuasaan sultan. Pendekatan ini berhasil meredam potensi pemberontakan sekaligus menumbuhkan loyalitas terhadap kerajaan. Sementara itu, Sultan Agung menghadapi perlawanan dari daerah pesisir Jawa yang belum sepenuhnya tunduk pada kekuasaan Mataram. Untuk mengatasinya, ia menerapkan kombinasi antara kekuatan militer dan pendekatan budaya. Sultan Agung menyatukan identitas politik dan budaya dengan memperkenalkan Kalender Sultan

Agung, yang memadukan unsur Islam dengan tradisi Jawa, sebagai simbol kesatuan spiritual dan politik (Diandini & Mujib, 2022).

Terdapat perbedaan pokok dalam gaya dan fokus kepemimpinan keduanya. Sultan Iskandar Muda dikenal sebagai pemimpin militer yang berfokus pada kekuatan maritim, dengan perdagangan dan diplomasi internasional sebagai alat utama kekuasaannya. Pemerintahannya bersifat terbuka terhadap hubungan luar dan berorientasi pada ekspansi wilayah. Sebaliknya, Sultan Agung lebih berfokus pada penguatan dari dalam, dengan konsolidasi wilayah daratan Jawa sebagai prioritas utama. Ia menekankan pembentukan identitas budaya dan politik yang unik dengan menggabungkan unsur Islam dan tradisi lokal sebagai dasar legitimasi pemerintahannya.

Kedua pemimpin ini pada akhirnya sama-sama menghadapi keterbatasan yang muncul setelah masa pemerintahan mereka berakhir. Sentralisasi kekuasaan yang sangat kuat menyebabkan ketergantungan terhadap figur sultan. Setelah Iskandar Muda wafat, Aceh melemah karena perebutan kekuasaan antar bangsawan. Begitu pula di Mataram, setelah Sultan Agung wafat, kekuasaan terpecah dan VOC mulai memanfaatkan konflik internal untuk memperluas pengaruhnya. Meskipun demikian, baik Iskandar Muda maupun Sultan Agung meninggalkan warisan besar: model kepemimpinan Islam yang memadukan kekuatan militer, legitimasi keagamaan, dan kebijakan politik yang adaptif terhadap kondisi sosial budayanya.

KESIMPULAN

Kesultanan Aceh dan Mataram merupakan dua kerajaan Islam terbesar di Nusantara pada abad ke-16 hingga ke-17 yang memainkan peran penting dalam membentuk dinamika politik, ekonomi, dan kebudayaan di wilayahnya masing-masing. Aceh berkembang pesat berkat letak strategisnya di Selat Malaka, menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam di Asia Tenggara, serta mencapai puncak kejayaan di bawah Sultan Iskandar Muda sebelum akhirnya melemah akibat konflik internal dan tekanan VOC. Sementara itu, Mataram muncul di Jawa setelah runtuhnya Pajang dan mencapai kejayaan di bawah Sultan Agung, yang berhasil menyatukan hampir seluruh Jawa serta mengintegrasikan nilai Islam dengan tradisi lokal. Namun, setelah masa keemasan tersebut, Mataram juga mengalami kemunduran karena konflik suksesi dan campur tangan VOC yang berujung pada perpecahan kerajaan melalui Perjanjian Giyanti tahun 1755. Kedua kesultanan ini menunjukkan bagaimana kejayaan politik Islam di Nusantara bergantung pada kemampuan penguasa dalam menjaga stabilitas internal dan menghadapi tekanan eksternal.

Pada abad ke-17, Sultan Iskandar Muda di Aceh dan Sultan Agung Anyakrakusuma di Mataram muncul sebagai dua pemimpin besar yang berhasil membawa kerajaannya mencapai puncak kejayaan politik, ekonomi, militer, dan keagamaan di Nusantara. Iskandar Muda memperkuat Aceh sebagai kekuatan maritim dengan sistem pemerintahan terpusat, reformasi birokrasi, serta hubungan diplomatik luas dengan dunia Islam, menjadikannya simbol kejayaan Islam di Asia Tenggara. Sementara itu, Sultan Agung menegaskan dominasi Mataram di Jawa melalui ekspansi militer besar-

besaran, perlawanan terhadap VOC, serta integrasi Islam dengan budaya Jawa yang tercermin dalam reformasi kalender dan karya sastra istana. Keduanya menunjukkan kepemimpinan yang visioner dan religius, memadukan kekuatan politik dengan legitimasi spiritual untuk memperkuat kedaulatan kerajaan.

Sultan Iskandar Muda dari Aceh dan Sultan Agung dari Mataram menegakkan sistem pemerintahan terpusat untuk memperkuat kekuasaan raja, meskipun dengan pendekatan berbeda sesuai karakter wilayahnya—Aceh dengan orientasi maritim dan perdagangan internasional, sedangkan Mataram dengan basis agraris dan konsolidasi daratan. Dalam bidang ekonomi, Iskandar Muda mengandalkan monopoli perdagangan lada untuk memperkuat kas kerajaan, sementara Sultan Agung memanfaatkan hasil pertanian sebagai sumber kekuatan negara. Keduanya juga menunjukkan perlawanan terhadap kekuatan kolonial Eropa, seperti Portugis dan VOC, serta memanfaatkan legitimasi agama untuk memperkuat otoritas politik. Walaupun setelah wafatnya kedua sultan kerajaan mereka mengalami kemunduran akibat lemahnya suksesi, Iskandar Muda dan Sultan Agung meninggalkan warisan penting berupa model kepemimpinan Islam yang memadukan kekuatan politik, militer, dan spiritual dalam membangun peradaban Nusantara.

DAFTAR PUSTAKA

- Afida, N. L., Susanto, D., & Nuriyadin, N. (2024). Politik Ekspansi Sultan Agung di Wilayah Timur Tanah Jawa (1614-1625 M). *Qurthuba: The Journal of History and Islamic Civilization*, 7(2), 136–152. <https://doi.org/10.15642/qurthuba.2024.7.2.136-152>
- Aziz, M. I., & Abdurrahman, D. (2022). Sufisme Jawa Dalam Serat Sastra Gending Sultan Agung Mataram. *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, 7(1), 37–52. <https://doi.org/10.30984/ajip.v7i1.1917>
- Azyumardi Azra. (2004). *ASIAN STUDIES ASSOCIATION OF AUSTRALIA Southeast Asia Publications Series THE ORIGINS OF ISLAMIC REFORMISM IN SOUTHEAST ASIA*. University of Hawai'i Press.
- Diandini, H., & Mujib, A. (2022). Akulturasi Islam dan Budaya Jawa pada Masa Kekuasaan Sultan Agung Di Kerajaan Mataram Islam. *Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu)* 7, 126–136.
- Graaf, H. . de. (1987). Awal Kebangkitan Mataram Masa Pemerintahan Senapati. In M. Rudyanto Arief. Pustaka Grafiti pers.
- Graaf, H. . de, & Pigeaud, T. G. (1985). *Kerajaan-Kerajaan Islam Di Jawa. Peralihan Dari Majapahit Ke Mataram* (Vol. 17). Grafiti Pers.
- Inajati. (2005). Kota Gede: an Archaeological Perspective of a Capital City in Java in the 17th Century. *Humaniora*, 17(2), 125–134.
- Lombard, D. (1991). *Kerajaan Aceh Jaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636)*. Balai Pustaka.

- Mailin, M. (2021). Peran Sultan Iskandar Muda dalam Pengembangan Islam dan Kesultanan Melayu di Sumatera Timur. *Jurnal Komunika Islamika : Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Kajian Islam*, 8(1), 25. <https://doi.org/10.37064/jki.v8i1.9478>
- Munawar, Z. (2021). Tanah, Otoritas Politik, dan Stabilitas Ekonomi Kerajaan Mataram Islam (1613-1645 M). *Diakronika*, 21(1), 1–13. <https://doi.org/10.24036/diakronika/vol21-iss1/163>
- Ricklefs, M. C. (2008). A History of Modern Indonesia since c .1200. In *A History of Modern Indonesia since c .1200* (4th ed.). Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.5040/9781350394582>
- Said, M. (1981). *Aceh Sepanjang Abad Jilid II*. P.T Harian Waspada Medan.
- Susilo, A. A. (2020). Sultan Agung Hanyakrakusuma dan Eksistensi Kesultanan Mataram. *Diakronika*, 20(2), 114. <https://doi.org/10.24036/diakronika/vol20-iss2/133>
- Yumna Nur, M. (2023). Sejarah Penggunaan Kalender Aji Saka di Tanah Jawa. *AL – AFAQ Jurnal Ilmu Falak Dan Astronomi*, 5(2), 182–194. http://p2k.unkris.ac.id/en3/1-3065-2962/Aji-Saka_35890_dharmaandigha_p2k-unkris.html
- Yuwono, A. T., & Braake, G. ter. (2025). The Battle of Mataram Sultanate and VOC Against Trunajaya Troops in Kediri (1678). *Siginjai: Jurnal Sejarah*, 5(1), 1–16. <https://doi.org/10.22437/js.v5i1.38476>